

PENGARUH KEMISKINAN TERHADAP PENYELESAIAN PENDIDIKAN JENJANG SMA/SEDERAJAT DI INDONESIA

Abstract

Poverty has become a problem in many countries and affects many aspects of human life, including education. This study aims to measure the effect of poverty on the completion of high school/equivalent education in Indonesia. This study uses the completion rate of high school/equivalent as the dependent variable and the percentage of poor population as the interest variable. Meanwhile, GRDP per capita, population growth rate, area, number of high schools/equivalent and number of high school/equivalent teachers are used as control variables. The analysis used is panel data regression with the Random Effect Model (REM) method. The results of the study show that poverty has a negative effect on the completion rate of high school/equivalent education in Indonesia. Population growth rate, area, and number of high schools/equivalent also have a negative effect on the completion rate of high school/equivalent education in Indonesia. Meanwhile, GRDP per capita and the number of high school/equivalent teachers have a positive effect on the completion rate of high school/equivalent education in Indonesia.

Gedung EKP, Prodi Ekonomi Pembangunan
FEB USK
Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia - 23111
Telp/Fax: (0651) 7551265
Email: ekapi.ekp@feb.unsyiah.ac.id

©2025 FEB USK. All rights reserved.

***Efran Siswanto 1¹**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia
E-mail: franz.succes@gmail.com*

I Dewa Gede Karma Wisana 2

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia
E-mail: dewa.wisana@gmail.com*

Keywords:

Poverty, Completion of High School/Equivalent, Panel Data, Random Effect Model (REM)

INFORMASI ARTIKEL

*Dikirim: 13 Maret 2025
Diterima setelah revisi: 27 Maret 2025
Diterima: 14 April 2025
Dipublikasi: Mei 2025*

¹ Efran Siswanto (*) adalah corresponding author

1. Pendahuluan

Gedro, et al. (2021) menyatakan bahwa pendidikan merupakan satu diantara kebutuhan penting selain sandang, pangan dan papan dalam kehidupan modern. Pendidikan yang bermutu merupakan alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan standar kesehatan dan gizi, serta mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Nursita dan Edy P. (2022) menyebutkan bahwa pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kemampuan SDM sehingga menjadikan suatu negara maju. Dengan memperoleh pendidikan yang berkualitas, individu dapat meningkatkan kemampuan berpikirnya serta menjadi tenaga kerja yang lebih kreatif.

Alamelu dan Revathy (2022) mengungkapkan bahwa pendidikan membantu pengembangan pengetahuan dan keterampilan individu. Individu yang berpendidikan dan memiliki pengetahuan yang memadai akan mampu meningkatkan upah dan mengarah pada pengentasan kemiskinan. Sementara Mihai, et al. (2015) menyampaikan bahwa pendidikan menciptakan kesadaran yang memfasilitasi tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Mereka berpendapat bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan yang diberikan dengan upah karyawan. Salah satu faktor utama dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi adalah pendidikan.

Julius dan Bawane (2011) juga mengatakan bahwa pendidikan telah diterima secara luas sebagai jalan keluar utama dari kemiskinan. Peran pencapaian pendidikan dalam pengentasan kemiskinan adalah hubungan linier antara pendidikan dan pendapatan. Pendidikan tidak hanya meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah bekerja, individu yang berpendidikan lebih baik memperoleh penghasilan yang lebih besar daripada yang berpendidikan rendah.

Meskipun pendidikan diyakini mampu membantu dalam meningkatkan produktivitas dan mengentaskan kemiskinan. Namun di satu sisi terdapat hubungan dua arah antara pendidikan dan kemiskinan. Menurut Julius dan Bawane (2011) bahwa hubungan dua arah antara pendidikan dan kemiskinan bisa dipahami dalam dua cara. Pertama, investasi dalam pendidikan meningkatkan keterampilan dan produktivitas rumah tangga miskin. Investasi ini meningkatkan upah serta kesejahteraan penduduk secara keseluruhan. Kedua, kemiskinan dapat menjadi kendala utama dalam pencapaian pendidikan.

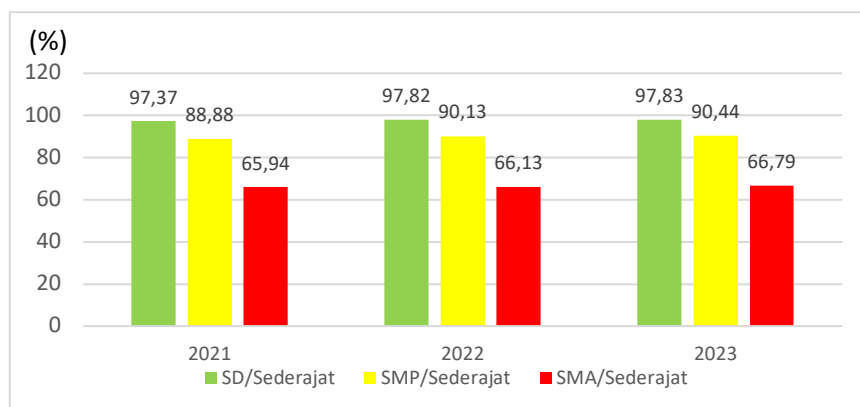
Sementara Chikoko dan Mthembu (2021) mengatakan bahwa pendidikan memiliki potensi untuk mengurangi atau bahkan memberantas kemiskinan secara drastis, tetapi kemiskinan juga dapat secara drastis mengurangi keberhasilan seseorang dalam pendidikan. Ritter (2015) beranggapan bahwa ekonomi atau kemiskinan sebagai faktor ganda. Pertama, siswa yang hidup

dalam kemiskinan berisiko tinggi putus sekolah. Kedua, siswa yang putus sekolah melanjutkan siklus kemiskinan karena prospek ekonomi dan karier masa depan mereka jauh lebih suram daripada mereka yang lulus sekolah.

Lanners (2022) menilai pendidikan mungkin sulit bagi anak yang tumbuh dalam kemiskinan karena berbagai alasan seperti tekanan mental, fisik, dan emosional. Suhendar, et al. (2024) menyebutkan salah satu dampak langsung dari kemiskinan adalah terbatasnya akses terhadap pendidikan. Keluarga miskin seringkali tidak mampu membiayai pendidikan seperti uang sekolah, buku, seragam, dan transportasi. Meskipun di sekolah negeri, pendidikan diberikan secara gratis, namun menurut Alamelu dan Revathy (2022) setiap individu harus memperoleh sendiri barang-barang lain seperti seragam, tas sekolah, alat tulis serta transportasi.

Suhendar, et al. (2024) mengatakan dalam beberapa kasus, anak-anak yang hidup dalam kemiskinan bahkan terpaksa bekerja untuk membantu mencari nafkah bagi keluarga. Nursita dan Edy P. (2022) melihat adanya fenomena dalam kehidupan keluarga miskin yaitu eksploitasi anak dalam rangka membantu menghidupi keluarga yang mengakibatkan anak-anak harus putus sekolah. Bahkan Baydu, Kaplan dan Bayar (2013) menyebutkan kekurangan dukungan dari orang tua maupun lingkungan sosial ini menyebabkan siswa miskin memiliki tingkat putus sekolah yang lebih tinggi. Senada, Alamelu dan Revathy (2022) beranggapan bahwa kondisi kemiskinan memaksa siswa putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menilai bahwa kemiskinan juga dapat mempengaruhi tingkat penyelesaian pendidikan di semua jenjang terutama pada SMA/ sederajat. Apalagi jika meninjau kondisi di Indonesia, tingkat kelulusan pada jenjang SMA/ sederajat masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penyelesaian pendidikan di jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat.



Gambar 1. Penyelesaian Jenjang Pendidikan di Indonesia Tahun 2021 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Diolah

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Gambar 1. menunjukkan tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/ sederajat di Indonesia dalam tiga tahun terakhir masih berada di bawah 70 persen yaitu masing-masing sebesar 65,94 persen pada tahun 2021, 66,13 persen pada tahun 2022 dan 66,79 persen pada tahun 2023. Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/ sederajat ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian tingkat kelulusan pada jenjang SD/ sederajat sebesar 97,83 persen maupun SMP/ sederajat sebesar 90,44 persen pada tahun 2023.

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengkaji bagaimana kemiskinan mempengaruhi penyelesaian atau kelulusan pada jenjang SMA. Hernandez (2011) pada penelitiannya menemukan bahwa anak-anak yang hidup dalam kemiskinan serta tidak mahir membaca di kelas tiga memiliki kemungkinan tiga kali lebih besar untuk putus sekolah atau gagal lulus SMA dibandingkan mereka yang tidak pernah miskin. Penelitian Baydu, Kaplan, dan Bayar (2013) mengidentifikasi adanya hubungan negatif yang signifikan antara kemiskinan dan tingkat kelulusan SMA di 50 negara bagian dan Distrik Columbia, Amerika Serikat. Selain itu, Lanners (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa kemiskinan mempengaruhi dalam memperoleh ijazah SMA serta hidup dalam kemiskinan dapat mempengaruhi prestasi akademik siswa secara signifikan. Sementara penelitian Zuhikmah, et al. (2024) menunjukkan bahwa kemiskinan mempengaruhi secara negatif terhadap tingkat penyelesaian pendidikan SMA/ Sederajat di Kalimantan Selatan, namun hasilnya tidak signifikan.

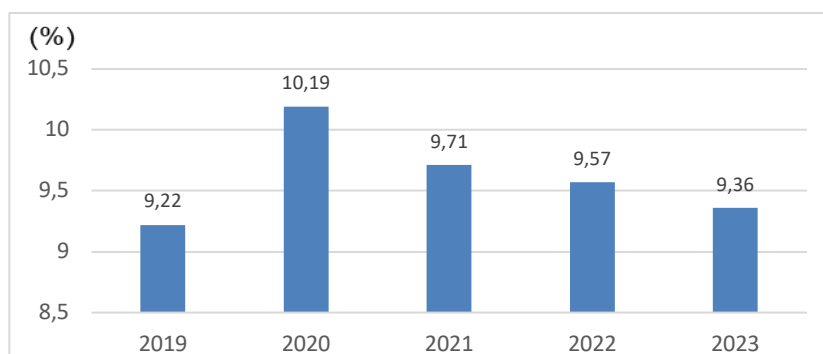
Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang telah disampaikan, terdapat hasil yang berbeda dari beberapa penelitian tersebut. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan kembali apakah kemiskinan berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/ Sederajat terutama untuk studi kasus di Indonesia masih sangat terbatas penelitian yang membahas topik tersebut.

2. Tinjauan Teoritis

Kemiskinan

Dalam memahami kemiskinan dan dampaknya terhadap pendidikan, kita perlu terlebih dahulu memahami beberapa definisi dari kemiskinan. Amartya Sen (dalam Nugroho, 2022) menyatakan bahwa kemiskinan adalah hidup di bawah kriteria tertentu, seperti tidak memiliki keterjangkauan untuk mendapatkan pangan, air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan pengetahuan. Sementara, BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan membayar kebutuhan pokok berupa makanan dan non makanan. Jika pengeluaran bulanan rata-rata per orang ada di bawah garis kemiskinan, maka mereka tergolong miskin.

Menurut Bank Dunia (2004) salah satu faktor kemiskinan yaitu minimnya pemasukan serta aset guna memperoleh kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Dari sudut pandang ekonomi, Sharp, et al. (dalam Kuncoro, 1997) menjelaskan penyebab kemiskinan. Pertama, alokasi kepemilikan sumber daya yang tidak seimbang menyebabkan penyebaran pemasukan yang tidak rata. Sumber daya yang ada untuk warga miskin terbatas serta bermutu rendah. Kedua, adanya kesenjangan mutu SDM. Produktivitas yang rendah dari kualitas SDM yang rendah mengakibatkan upah menjadi rendah. Rendahnya kualitas SDM ini disebabkan oleh tingkat pendidikan, keadaan tidak beruntung, diskriminatif dan faktor keturunan. Ketiga, kemiskinan disebabkan oleh adanya kesenjangan kemudahan akan modal.



Gambar 2.1. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2019 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

Untuk melihat tren kemiskinan yang ada di Indonesia dapat dilihat melalui Gambar 2.1. Dalam lima tahun terakhir persentase penduduk miskin terlihat masih cukup tinggi yaitu 9-10 persen. Pada tahun 2019, penduduk miskin tercatat sebesar 9,22 persen. Pada tahun 2020, penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 10,19 persen. Peningkatan di tahun 2020 ini diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Pada 2021 jumlah penduduk miskin turun menjadi 9,71 persen. Pada tahun 2022 dan 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia juga turun menjadi 9,57 persen dan 9,36 persen.

Dampak Kemiskinan Terhadap Pendidikan

Secara umum, kemiskinan membuat kita berpikir tentang sebuah kegagalan pendidikan. Anak-anak yang miskin tidak mempunyai persiapan yang baik untuk bersekolah. Mayoritas anak-anak yang lahir dalam kemiskinan mempunyai kemungkinan lebih kecil untuk berhasil di sekolah (Mihai et al., 2015). Julius dan Bawane (2011) menilai bahwa pencapaian pendidikan yang baik jauh dari individu yang dilanda kemiskinan. Orang-orang yang sangat miskin tidak diberi akses ke pendidikan. Selain itu, kemiskinan juga menghambat pembelajaran di negara-negara berkembang melalui gizi yang buruk, kesehatan, keadaan rumah (kurangnya buku, penerangan atau tempat

untuk mengerjakan pekerjaan rumah), akses ke pendidikan, kualitas, biaya dan sumber daya yang tidak memadai untuk pendidikan.

Sementara Moyo (2013) menyatakan bahwa kemiskinan berdampak negatif pada prestasi akademik. Kemiskinan menghambat perkembangan manusia pada aspek fisik, mental, bahasa, dan sosial. Selain itu, orang tua yang miskin gagal menyediakan sumber daya keuangan dan materi yang memadai sebagai syarat anak untuk masuk sekolah. Adapun Suhendar, et al. (2024) berpendapat bahwa kemiskinan berdampak pada rendahnya partisipasi dalam pendidikan. Dalam banyak kasus, anak-anak dari keluarga miskin diharapkan membantu mencari nafkah keluarga atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Akibatnya, mereka sering tidak masuk sekolah atau tidak masuk sekolah secara teratur. Selain keterbatasan akses, kemiskinan juga mempengaruhi kualitas pendidikan seperti kurangnya fasilitas sekolah (laboratorium, perpustakaan dan ruang kelas) serta guru yang berkualitas.

Nursita dan Edy P. (2022) berpendapat bahwa anak-anak dari keluarga miskin sering kali terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena harus bekerja guna menopang ekonomi serta memenuhi kebutuhan keluarga. Pilihan orang tua dalam rumah tangga miskin memandang pekerja anak sebagai aset sekaligus tenaga tambahan, sehingga anak-anak didorong untuk bekerja demi meningkatkan pendapatan keluarga.

Pendidikan di Indonesia

Pembangunan telah memperoleh banyak manfaat dari pendidikan dan hal ini akan terus berlanjut. Pertama, pendidikan dapat meningkatkan harga diri dan potensi seseorang. Kedua, pendidikan meningkatkan peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Ketiga, mereka yang berpendidikan lebih tinggi akan berkontribusi lebih besar terhadap masyarakat (Shaturaev, 2022).

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, rujukan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan membangun peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuannya adalah agar peserta didik berkembang menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pada Pasal 13 (1) disebutkan “Jalur Pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal. Sementara pada Pasal 14 tertulis “Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”. Pasal 18 menyatakan bahwa jenjang pendidikan menengah mencakup pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

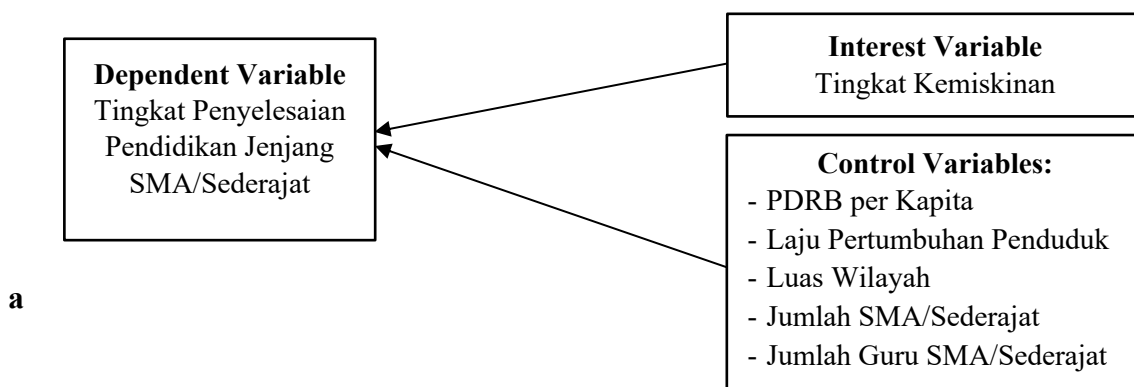
Pendidikan pada jenjang ini dapat berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), maupun bentuk lain yang setara.

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Indonesia mengatur bahwa setiap warga negara berusia 7–15 tahun diwajibkan menempuh pendidikan dasar selama sembilan tahun. Sementara itu, salah satu prinsip Nawacita Pendidikan pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah wajib belajar 12 tahun. Melalui implementasi Program Indonesia Pintar (PIP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 berisi amanat Wajib Belajar 12 tahun.

Kerangka Analisis

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, diketahui bahwa kemiskinan dapat menghambat seseorang dalam memperoleh pendidikan. Anak-anak yang berada dalam keluarga miskin terkadang harus putus sekolah karena membantu perekonomian keluarga. Sehingga keadaan ini membuat mereka tidak mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi seperti lulus SMA/ sederajat.

Gambar 2.2. di bawah ini menyajikan kerangka analisis yang menjadi acuan dalam penelitian ini.



Gambar 2.2. Kerangka Analisis Penelitian

Dalam melihat pengaruh kemiskinan terhadap penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat dalam penelitian ini juga ditambahkan *control variables* sebagai berikut:

1. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang menggambarkan pendapatan rata-rata penduduk, tingkat kesejahteraan dan standar hidup masyarakat di suatu daerah. Apabila pendapatan masyarakat di suatu daerah tinggi diharapkan juga mereka dapat memperoleh pendidikan yang lebih tinggi seperti menyelesaikan pendidikan jenjang SMA/Sederajat. Yang dan Cao (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa peningkatan PDB per kapita secara signifikan dapat meningkatkan capaian pendidikan masyarakat di China.

2. Laju pertumbuhan penduduk. Daerah dengan laju pertumbuhan penduduk besar menyebabkan wilayah tersebut mempunyai jumlah penduduk serta kepadatan penduduk yang besar. Hal ini dapat berdampak terhadap berkurangnya kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas. Menurut *United Nations* (PBB) bahwa negara-negara yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang besar dan populasi muda cenderung memiliki tingkat pendaftaran yang lebih rendah pada pendidikan dasar dan menengah.
3. Luas wilayah. Luas wilayah yang besar bahkan terpencil dapat menjadi penghambat bagi masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap pendidikan. Apalagi jika luasnya suatu wilayah tidak difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai seperti jalan, alat transportasi, serta teknologi informatika.
4. Jumlah SMA/Sederajat. Sekolah merupakan penunjang utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketersediaan jumlah sekolah serta sarana prasarana sekolah yang memadai pada suatu daerah diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi seperti lulusan SMA/ sederajat. Virdam dan Ariani (2023) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa banyaknya sekolah memberikan pengaruh positif terhadap tingkat partisipasi sekolah di provinsi di Sulawesi.
5. Jumlah Guru SMA/Sederajat. Guru mempunyai peran penting untuk memastikan kualitas sebuah pendidikan. Meskipun menurut BPS saat ini rasio murid-guru di Indonesia sudah memenuhi standar ideal yang ditetapkan. Namun, distribusi guru di setiap daerah masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Yang dan Cao (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa peningkatan rasio murid-guru secara signifikan dapat menurunkan pencapaian pendidikan masyarakat di China. Dengan kata lain, kurangnya ketersediaan jumlah guru dapat menurunkan pencapaian pendidikan masyarakat di China.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kemiskinan terhadap tingkat penyelesaian atau kelulusan pada jenjang SMA namun ditemukan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Hernandez (2011) menemukan bahwa anak-anak yang hidup dalam kemiskinan serta tidak mahir membaca di kelas tiga memiliki kemungkinan tiga kali lebih besar untuk putus sekolah atau gagal lulus SMA dibandingkan mereka yang tidak pernah miskin. Baydu, Kaplan, dan Bayar (2013) dalam penelitiannya menemukan hubungan negatif dan signifikan antara kemiskinan dan tingkat kelulusan SMA di 50 negara bagian dan Distrik Columbia, Amerika Serikat. Pada saat tingkat kemiskinan di Amerika Serikat meningkat maka tingkat kelulusan SMA mengalami penurunan. Hasil penelitian Lee (2014) menemukan bahwa kemiskinan berdampak

negatif pada prestasi akademik siswa. Dia menyatakan bahwa kemiskinan yang berkepanjangan secara substansial menurunkan peluang anak-anak untuk lulus dari SMA. Sementara penelitian Lanners (2022) menemukan bahwa kemiskinan mempengaruhi perolehan ijazah SMA dan bahwa hidup dalam kemiskinan dapat mempengaruhi prestasi akademik siswa secara signifikan.

Selain hasil penelitian di atas, Suryadarma dan Suryahadi (2009) pada penelitiannya menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencapaian jenjang SMP. Namun kemiskinan berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap penyelesaian jenjang SMA. Sebaliknya kemampuan skolastik tidak berpengaruh terhadap penyelesaian jenjang SMP. Namun kemampuan skolastik berpengaruh terhadap penyelesaian jenjang SMA. Sementara hasil penelitian Zulhikmah, et al. (2024) menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh secara negatif terhadap tingkat penyelesaian pendidikan SMA/Sederajat di Kalimantan Selatan, namun hasilnya tidak signifikan.

3. Metodologi Penelitian

Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperoleh dari 34 provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2023. *Dependent variable* yang digunakan ialah penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat berupa data tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat. *Interest variable* yang digunakan adalah kemiskinan berupa data persentase penduduk miskin. Sementara *control variables* yang digunakan ialah PDRB per kapita berupa data PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan penduduk berupa data laju pertumbuhan penduduk. Luas wilayah berupa data persentase terhadap luas wilayah di Indonesia. SMA/Sederajat berupa data jumlah SMA/Sederajat dan guru SMA/Sederajat berupa jumlah guru SMA/Sederajat.

Model Penelitian

Analisis di dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel. Terdapat tiga model dalam penggunaan data panel yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Dalam menentukan model terbaik dilakukan melalui tahap pengujian yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.

Adapun model estimasi di dalam penelitian dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Penyelesaian SMA} = & \alpha + \beta_1 \text{Kemiskinan}_{it} + \beta_2 \text{PDRB}_{it} + \beta_3 \text{Laju Penduduk}_{it} \\ & + \beta_4 \text{Luas Wilayah}_{it} + \beta_5 \text{SMA}_{it} + \beta_6 \text{Guru SMA}_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Dimana, penyelesaian sma merupakan tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat (persen), kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin (persen), pdrb merupakan PDRB per kapita (rupiah), laju penduduk merupakan laju pertumbuhan penduduk (persen), luas wilayah merupakan persentase terhadap luas wilayah Indonesia (persen), sma merupakan jumlah SMA/Sederajat (unit), guru sma merupakan jumlah guru SMA/Sederajat (orang), α merupakan konstanta, β merupakan nilai koefisien regresi, ε merupakan *error*, i merupakan *Cross Section* (34 provinsi) dan t merupakan *time series* (2015-2023).

Hipotesis

Berdasarkan teori, tinjauan literatur, dan penelitian terkait sebelumnya, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H_0 : Kemiskinan, PDRB per kapita, laju pertumbuhan penduduk, luas wilayah, jumlah SMA/Sederajat, dan jumlah guru SMA/Sederajat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyelesaian jenjang SMA/Sederajat di Indonesia.
- H_1 : Kemiskinan, PDRB per kapita, laju pertumbuhan penduduk, luas wilayah, jumlah SMA/Sederajat, dan jumlah guru SMA/Sederajat berpengaruh secara signifikan terhadap penyelesaian jenjang SMA/Sederajat di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah teknik analisis data yang digunakan guna menggambarkan karakteristik sampel yang diteliti meliputi nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standard deviasi setiap variabel sepanjang jangka waktu pengamatan.

Tabel 4.1. Deskripsi Statistik dari Variabel Penelitian

| Variable | Obs | Mean | Std. dev. | Min | Max |
|----------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|
| Penyelesaian SMA/Sederajat | 306 | 61,60 | 11,49 | 27,44 | 90,12 |
| Kemiskinan | 306 | 10,72 | 5,58 | 3,42 | 28,4 |
| PDRB per kapita | 306 | 42.597,89 | 32.025,3 | 11.087,91 | 192.134 |
| Laju Pertumbuhan Penduduk | 306 | 1,60 | 0,61 | 0 | 4,13 |
| Luas Wilayah | 306 | 2,94 | 3,14 | 0,03 | 16,67 |
| Jumlah SMA/Sederajat | 306 | 1.076 | 1.309,40 | 90 | 6.121 |
| Jumlah Guru SMA/Sederajat | 306 | 22.837 | 26.336,92 | 1.804 | 124.699 |

Sumber: Hasil olah Stata

Pada Tabel 4.1. dapat dilihat bahwa tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat di Indonesia pada kurun waktu 2015-2023 masih tergolong rendah dengan rata-rata sebesar 61,60

persen. Dimana tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat terendah berada di Papua pada tahun 2019 sebesar 27,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapatnya ketimpangan dalam pemerataan pembangunan di Indonesia termasuk di bidang pendidikan terutama di wilayah bagian timur. Sementara tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat tertinggi berada di DI Yogyakarta pada tahun 2021 sebesar 90,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah DI Yogyakarta telah berhasil melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Di samping itu, masyarakat DI Yogyakarta juga telah menyadari terhadap pentingnya pendidikan.

Secara umum pada Gambar 4.1. tercatat ada 16 provinsi dengan pencapaian tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat di atas rata-rata nasional. DI Yogyakarta tercatat sebagai provinsi tertinggi dengan rata-rata sebesar 85,39 persen. DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi tertinggi kedua dengan rata-rata sebesar 82,39 persen. Selanjutnya, Kepulauan Riau tercatat sebagai provinsi tertinggi ketiga dengan rata-rata sebesar 77,60 persen. Selain itu, tercatat ada 18 provinsi yang memiliki nilai rata-rata tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat di bawah rata-rata nasional. Papua tercatat sebagai provinsi terendah dengan rata-rata sebesar 33,01 persen. Nusa Tenggara Timur tercatat sebagai provinsi terendah kedua dengan rata-rata sebesar 43,65 persen. Selanjutnya, Kalimantan Timur tercatat sebagai provinsi terendah ketiga dengan rata-rata sebesar 48,28 persen. Terdapatnya kesenjangan dalam penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat di Indonesia ini menunjukkan bahwa belum terjadinya pemerataan pendidikan pada masyarakat terutama di Indonesia bagian timur seperti yang terjadi di Papua dan Nusa Tenggara Timur.

Pada Tabel 4.1. dapat dilihat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada kurun waktu 2015-2023. Dimana rata-rata penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 10,71 persen. Jumlah penduduk miskin terendah berada di DKI Jakarta pada tahun 2019 sebesar 3,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi mendapatkan efek dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terbesar. Sementara jumlah penduduk miskin tertinggi berada di provinsi Papua pada tahun 2016 sebesar 28,4 persen. Hal ini dikarenakan terjadinya ketimpangan pembangunan di Indonesia terutama untuk wilayah timur yang pembangunannya masih rendah.

Secara umum pada Gambar 4.2. tercatat ada 18 provinsi yang berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan Indonesia. DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terendah dengan rata-rata sebesar 4,06 persen. Bali tercatat sebagai provinsi terendah kedua dengan rata-rata sebesar 4,33 persen. Sementara Kalimantan Selatan tercatat sebagai provinsi terendah ketiga dengan rata-rata sebesar 4,59 persen. Selain itu, tercatat ada 16 provinsi yang

berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan Indonesia. Papua tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi dengan rata-rata sebesar 27,28 persen. Papua Barat tercatat sebagai provinsi tertinggi kedua dengan rata-rata sebesar sebesar 22,59 persen. Selanjutnya Nusa Tenggara Timur tercatat sebagai provinsi tertinggi ketiga dengan rata-rata sebesar sebesar 21,05 persen. Masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah timur seperti Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur merupakan gambaran bahwa belum terjadinya pemerataan pembangunan dan perekonomian di Indonesia.

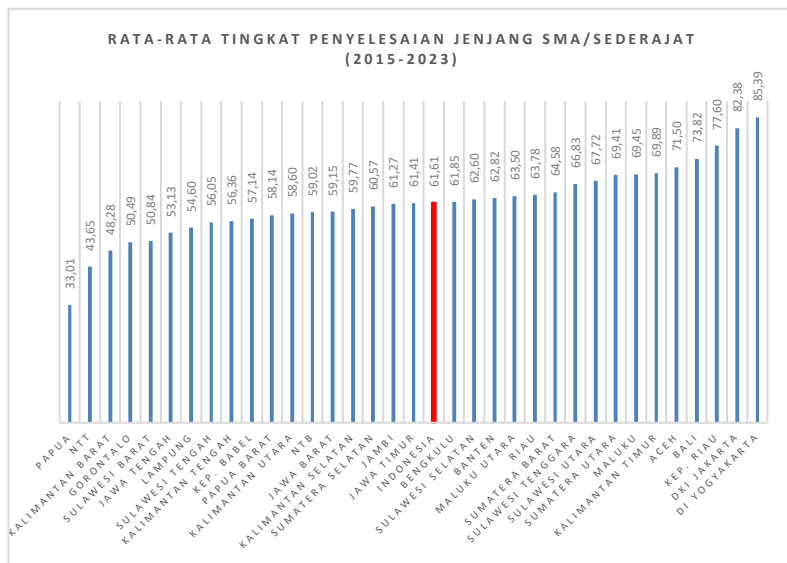
Berikutnya pada Tabel 4.1. tercatat rata-rata PDRB per kapita Indonesia pada periode 2015-2023 sebesar Rp42.597.890. Dimana PDRB per kapita tertinggi diperoleh oleh DKI Jakarta pada tahun 2023 sebesar Rp192.134.000. Tingginya PDRB per kapita ini dikarenakan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan juga pusat ekonomi di Indonesia. Sementara PDRB per kapita terendah diperoleh oleh Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015 sebesar Rp11.087.910. Hal ini menunjukkan bahwa belum meratanya perekonomian di Indonesia terutama di wilayah timur.

Pada Tabel 4.1. tercatat rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Indonesia pada periode 2015-2023 sebesar 1,60 persen. Papua tercatat sebagai provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 4,13. Hal ini menunjukkan bahwa Papua belum terlalu efektif dalam menekan pertumbuhan penduduk. Sementara Kalimantan Utara tercatat sebagai provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terkecil pada tahun 2015 dengan persentase sebesar 0. Hal ini disebabkan Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda yang disahkan pada tahun 2012 dimana perhitungan laju pertumbuhan penduduknya masih digabung dengan provinsi Kalimantan Timur.

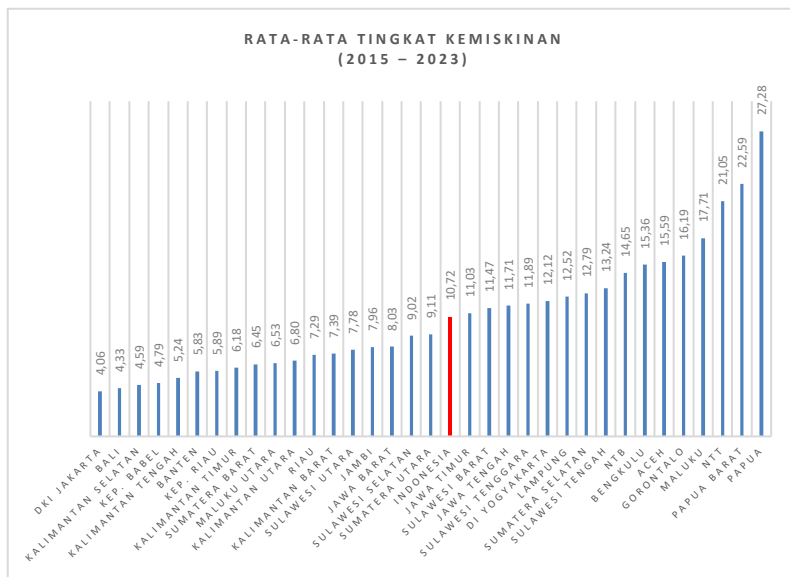
Pada Tabel 4.1. tercatat rata-rata luas wilayah provinsi di Indonesia pada periode 2015-2023 sebesar 2,94 dari total luas wilayah Indonesia. Papua tercatat sebagai provinsi dengan luas wilayah terbesar dengan luas wilayah sebesar 16,67 persen dari total luas wilayah Indonesia. Sementara DKI Jakarta tercatat dengan luas wilayah terkecil dengan luas wilayah sebesar 0,03 persen dari total luas wilayah Indonesia.

Pada Tabel 4.1. tercatat rata-rata jumlah SMA/Sederajat di Indonesia pada periode 2015 - 2023 sebanyak 1.076 unit. Jumlah SMA/Sederajat terbanyak berada di Jawa Barat pada tahun 2023 sebanyak 6.121 Unit. Hal ini mengingat bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk dan siswa SMA/Sederajat terbesar di Indonesia. Sementara Jumlah SMA/Sederajat paling sedikit berada di provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015 sebanyak 60 Unit. Hal ini mengingat Kalimantan Utara merupakan provinsi ke-34 dan termuda di Indonesia yang disahkan pada tahun 2012.

Pada Tabel 4.1. tercatat rata-rata jumlah guru SMA/Sederajat di Indonesia pada periode 2015-2023 sebanyak 22.837 orang. Jumlah guru SMA/Sederajat terbanyak berada di Jawa Barat pada tahun 2023 sebanyak 124.699 orang. Hal ini mengingat bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk dan siswa SMA/Sederajat terbanyak di Indonesia. Sementara Jumlah guru SMA/Sederajat paling sedikit berada di Kalimantan Utara pada tahun 2015 sebanyak 1.804 orang. Hal ini mengingat provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi ke-34 dan termuda di Indonesia yang disahkan pada tahun 2012.



Gambar 4.1. Rata-Rata Tingkat Penyelesaian SMA/Sederajat (2015-2023)
 Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)



Gambar 4.2. Rata-Rata Tingkat Kemiskinan (2015-2023)
 Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Analisis Statistik

Analisis statistik menjelaskan tahapan pengolahan data pada model, pengujian variabel penelitian, serta hasil dan interpretasi estimasi. Pada analisis statistik akan dilihat sejauh mana

interest variable dan *control variables* dalam mempengaruhi *dependent variable* yang terdapat dalam penelitian.

Dalam menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat di Indonesia digunakan regresi data panel. Setelah dilakukan pengujian diperoleh bahwa model terbaik dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4.2. Hasil Estimasi Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMA/Sederajat

| | Penyelesaian SMA/Sederajat |
|------------------------------|----------------------------|
| Kemiskinan | -0,703*** (0,242) |
| PDRB Per Kapita | 0,0002*** (0,000) |
| Laju Pertumbuhan Penduduk | -0,693 (0,687) |
| Luas Wilayah | -1,147** (0,489) |
| Jumlah SMA/Sederajat | -0,017*** (0,003) |
| Jumlah Guru SMA/Sederajat | 0,001*** (0,0001) |
| _cons | 64,184 |
| Observasi | 306 |
| R ² | 0,365 |
| *p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01 | |

Sumber: Hasil olah Stata

Berdasarkan Tabel 4.2 mencerminkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat di Indonesia dengan tingkat signifikansi <0,01. Koefisien regresi untuk kemiskinan sebesar -0,703, artinya apabila kemiskinan meningkat sebesar 1 persen maka tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat akan menurun sebesar 0,703. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Baydu, Kaplan, dan Bayar (2013) yang menemukan hubungan negatif dan signifikan antara kemiskinan dan tingkat kelulusan SMA di 50 negara bagian dan Distrik Columbia, Amerika Serikat. Dimana pada saat tingkat kemiskinan di Amerika Serikat meningkat maka tingkat kelulusan SMA mengalami penurunan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Lanners (2022) yang menemukan bahwa kemiskinan mempengaruhi perolehan ijazah sekolah menengah atas dan bahwa hidup dalam kemiskinan dapat mempengaruhi prestasi akademik siswa secara signifikan. Siswa yang dibesarkan dalam kemiskinan mungkin merasa sulit untuk menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas mereka karena berbagai alasan seperti tekanan mental, fisik, dan emosional.

Adapun hasil penelitian untuk *control variables*, dimana PDRB per kapita berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat di Indonesia dengan tingkat signifikansi $<0,01$. Koefisien regresi untuk PDRB per kapita sebesar 0,0002, artinya apabila PDRB per kapita meningkat sebesar 1 persen maka tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat akan meningkat sebesar 0,0002. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin besar pendapatan yang diperoleh masyarakat maka akan meningkatkan peluang mereka untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Yang dan Cao (2023) yang menemukan bahwa peningkatan PDB per kapita secara signifikan dapat meningkatkan capaian pendidikan masyarakat di China. Hasil di atas juga sejalan dengan penelitian Virdam dan Ariani (2023) yang menyatakan bahwa PDRB per kapita berpengaruh secara positif terhadap angka partisipasi sekolah pada provinsi di Pulau Sulawesi.

Laju pertumbuhan penduduk berpengaruh secara negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat di Indonesia dengan tingkat signifikansi $>0,10$. Koefisien regresi untuk laju pertumbuhan penduduk sebesar -0,693, artinya apabila laju pertumbuhan penduduk meningkat sebesar 1 persen maka tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat akan menurun sebesar 0,693. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan laju pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan bertambahnya kepadatan penduduk di suatu daerah. Namun, bertambahnya jumlah penduduk tidak serta merta diikuti penambahan sarana dan prasarana yang ada. Sehingga hal ini dapat mengurangi akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. *United Nations* (PBB) mengungkapkan bahwa negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan populasi muda cenderung memiliki tingkat pendaftaran yang lebih rendah pada pendidikan dasar dan menengah.

Luas wilayah berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat di Indonesia dengan tingkat signifikansi $<0,05$. Koefisien regresi untuk luas wilayah sebesar -1,147, artinya apabila luas wilayah meningkat sebesar 1 persen maka tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat akan menurun sebesar 1,147. Hal ini dapat terjadi karena daerah yang memiliki luas wilayah yang besar bahkan terpencil, masyarakatnya cenderung kesulitan dalam mengakses sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya. Falch, et.al (2013) dalam penelitiannya mencoba menganalisis pengaruh kedekatan geografis dengan sekolah menengah atas terhadap kelulusan di Norwegia. Hasilnya ditemukan bahwa berkurangnya waktu tempuh ke sekolah memiliki pengaruh positif terhadap kelulusan siswa.

Jumlah SMA/Sederajat berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat di Indonesia dengan tingkat signifikansi $<0,01$. Koefisien regresi untuk jumlah SMA/Sederajat sebesar $-0,017$, artinya apabila jumlah SMA/Sederajat meningkat sebesar 1 persen maka tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat akan menurun sebesar $0,017$. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Virdam dan Ariani (2023) yang menyatakan bahwa jumlah sekolah berpengaruh secara positif terhadap angka partisipasi sekolah pada provinsi di Pulau Sulawesi. Hal ini dapat terjadi karena salah satunya disebabkan pemberlakuan jalur zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam beberapa tahun terakhir yang menyebabkan sekolah negeri yang ada tidak mampu menampung semua peserta didik yang mendaftar pada jenjang sekolah berikutnya. Sementara untuk bersekolah di sekolah swasta cenderung lebih mahal daripada di sekolah negeri.

Jumlah guru SMA/Sederajat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat di Indonesia dengan tingkat signifikansi $<0,01$. Koefisien regresi untuk variabel jumlah guru SMA/Sederajat sebesar $0,001$, artinya apabila jumlah SMA/Sederajat meningkat sebesar 1 persen maka tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat akan meningkat sebesar $0,001$. Hasil ini dapat menjelaskan bahwa betapa pentingnya keberadaan dan peran guru dalam terlaksananya keberlangsungan pendidikan yang baik dan berkualitas. Yang dan Cao (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa peningkatan rasio murid-guru secara signifikan dapat menurunkan pencapaian pendidikan masyarakat di China. Dengan kata lain, kurangnya ketersediaan jumlah guru di sekolah dapat menurunkan pencapaian pendidikan. Sebaliknya meningkatnya ketersediaan jumlah guru di sekolah dapat meningkatkan pencapaian pendidikan.

Adapun nilai konstanta sebesar $64,184$ hal ini berarti bahwa bila variabel kemiskinan, PDRB per kapita, laju pertumbuhan penduduk, luas wilayah, jumlah SMA/Sederajat, dan jumlah guru SMA/Sederajat konstan atau tidak mengalami perubahan, maka tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat sebesar $64,184$. Disamping itu, diperoleh nilai R^2 sebesar $0,365$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat di Indonesia dipengaruhi oleh variabel kemiskinan, PDRB per kapita, laju pertumbuhan penduduk, luas wilayah, jumlah SMA/Sederajat, dan jumlah guru SMA/Sederajat sebesar $36,5$ persen sementara $63,5$ persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

5. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh kemiskinan terhadap penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat di Indonesia. Apabila tingkat kemiskinan meningkat, maka tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat di Indonesia akan mengalami penurunan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk berpengaruh secara negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat di Indonesia. Luas wilayah berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat di Indonesia.

Jumlah SMA/Sederajat berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat di Indonesia. Terakhir, jumlah guru SMA/Sederajat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat di Indonesia.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian di atas, penulis mencoba menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat dijalankan guna meningkatkan tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/Sederajat di Indonesia. Rekomendasi kebijakan tersebut antara lain: 1) Pemerintah harus meningkatkan usaha dalam mempercepat pengurangan angka kemiskinan terutama di provinsi yang angka kemiskinannya masih cukup tinggi seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Gorontalo; 2) Pemerintah harus lebih berusaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta melakukan pemerataan pendapatan dengan mendorong peningkatan produktifitas sektor usaha serta memperluas lapangan pekerjaan; 3) Pemerintah melanjutkan dan meningkatkan program yang telah berhasil dalam menekan laju pertumbuhan penduduk seperti Program Keluarga Berencana (KB) guna menghasilkan penduduk yang berkualitas dengan mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi; 4) Pemerintah memastikan ketersediaan akses serta sarana dan prasana yang memadai di daerah yang luas dan sulit untuk dijangkau; 5) Pemerintah tidak hanya berfokus dalam penambahan jumlah SMA/Sederajat, akan tetapi juga memperhatikan ketersediaan sarana dan prasana sekolah yang baik dan layak seperti bangunan sekolah, perpustakaan, laboratorium dan komputer; 6) Pemerintah lebih memperhatikan

ketersediaan guru di daerah yang masih kekurangan guru SMA/Sederajat serta lebih berusaha dalam meningkatkan kualitas guru yang ada dengan melaksanakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi guru serta mendorong guru untuk dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Daftar Referensi

- Alamelu, M. D., and Revathy, V. (2022). Impact of Poverty on Education in India. *International Journal of Health Sciences*, 6(S1), 698-707.
- Baydu, M. M., et al. (2013). Facing The Influence of Poverty on Graduation Rates in Public High Schools. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 84, 233 – 237.
- Chikoko, V. and Mthembu, P. (2021). The Impact of Poverty on Basic Education in South Africa: A Systematic Review of Literature. *Systematic Reviews of Research in Basic Education in South Africa. Stellenbosch: African Sun Media.*
- Falch, T., et al (2013). Geographical constraints and educational attainment. *Regional Science and Urban Economics*, 43 (1), 164-176.
- Gedro, D. M., et al. (2021). Impact of Poverty on Quality of Education in Haiti. *Journal of Education* 4 (7), 1-9. <https://doi.org/10.53819/810181025019>
- Hernandez, D.J. (2011). How Third-Grade Reading Skills and Poverty Influence High School Graduation.
- Julius, M. K. and Bawane, J. (2011). Education And Proverty, Relationship and Concerns a Case for Kenya. *Problems of Education in the 21st Century*, 32, 72-85.
- Lanners, A. (2022). The Impact of Poverty on High School Graduation Rates [Master's thesis, Bethel University]. *Spark Repository*. <https://spark.bethel.edu/etd/924>
- Lee, D. (2014). Age Trajectories of Poverty During Childhood and High School Graduation. *Sociological Science* 1, 344-365.
- Mihai, M., et al. (2015). Education and Poverty. *Procedia Economics and Finance* 32, 855 – 860.
- Moyo, W. (2013). Causes And Effects of Poverty on Academic Achievements of Rural Secondary School Students: Case of Tshazi Secondary School in Insiza District. *International Journal of Asian Social Science*, 3(10), 2104-2113.
- Nursita, L. and Edy, B.S.P. (2022). Pendidikan Pekerja Anak: Dampak Kemiskinan Pada Pendidikan. *Jambura Economic Education Journal*, 4, 1.
- Ritter, B. (2015). Factors Influencing High School Graduation. *Issue Brief Prepared for the Washington Student Achievement Council.*
- Satria, D. Head of International Undergraduate Program (Economics, Finance and Banking), Universitas Brawijaya. Panel Data with Stata.
- Shaturaev, J. N. (2022). Education In Indonesia: Financing, Challenges of Quality and Academic Results in Primary Education. <https://www.researchgate.net/publication/360217596>
- Suhendar, F. A., et al (2024). The Impact of Poverty in Indonesia on Education. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 8, 2.
- Suryadarma, D. and Suryahadi, A. (2009). The Contrasting Role of Ability and Poverty on Education Attainment: Evidence from Indonesia. Jakarta: SMERU Research Institute.

- Virdam, F., and Ariani, M. B. N. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah pada Provinsi di Pulau Sulawesi. *Jurnal of Development Economic and Digitalization*, 2(1), 20–35.
- Yang, L., and Cao, S. (2023). What factors are driving the rapid growth of education levels in China? *Heliyon*, 9(5), e16342.
- Zulhikmah, N. L., et al. (2024). Does Poverty Affect High School Completion Rates in South Kalimantan? *Proceeding International Conference on Learning Community (ICLC)*, 1, 1.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/>
<https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3929-menganalisa-perangkap-kemiskinan-di-indonesia>
<https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-2-tahap-analisis/>